Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Oleh :

Tri Handayani

1201413058

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung"** telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 April 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd

NIP. 195305281980031002

Dosen Pembimbing II

Drs. Ilyas, M.Ag

NIP. 196606011988031003

Mengetahui,

a.n. Ketua Jurusan

Pendidikan Luar Sekolah

Sekretaris

Dr. Tri Suminar, M.Pd

NIP. 19670526 199512 2 001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahan di hadapan sidang Panitian Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 April 2017

Panitia :

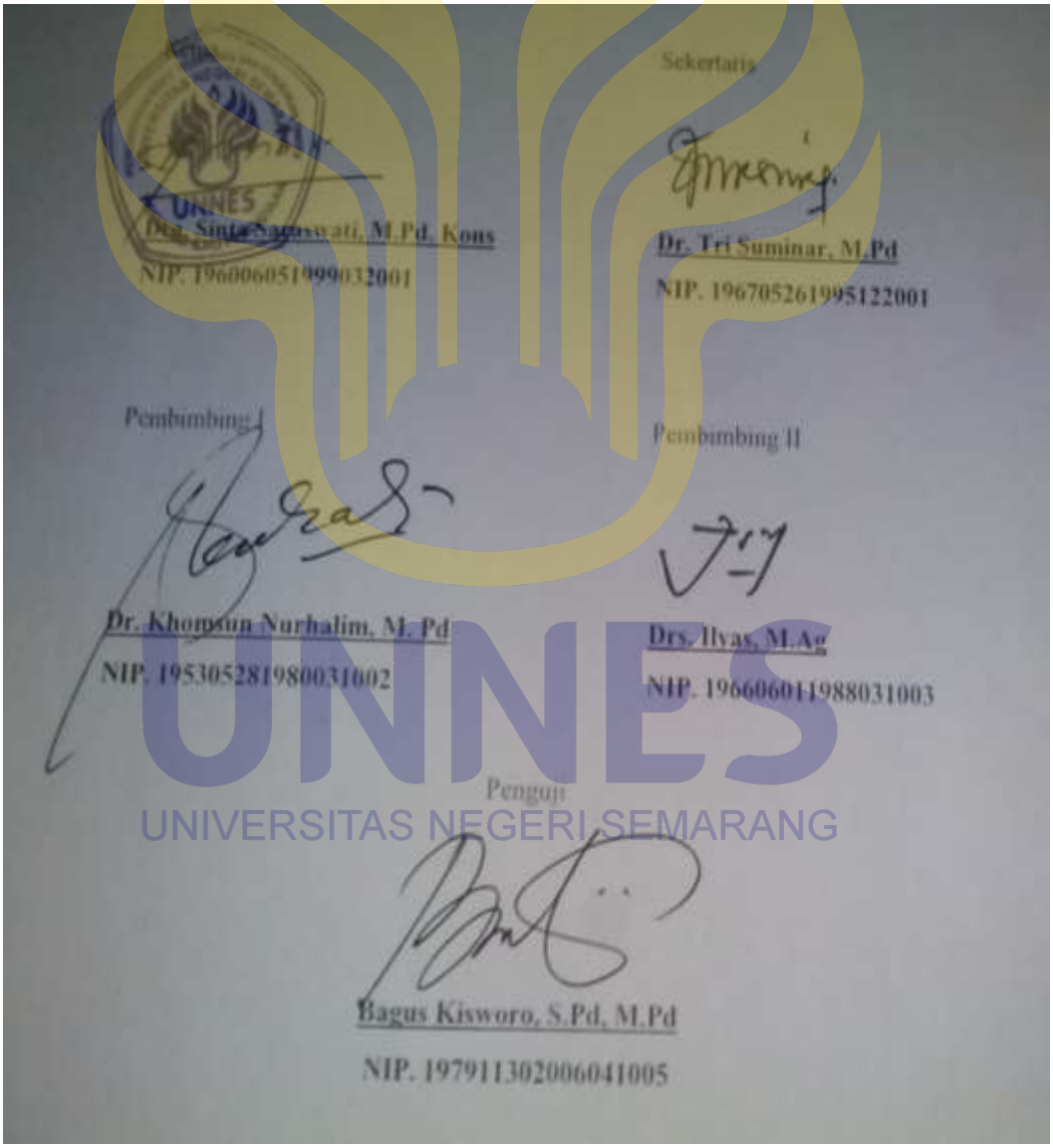

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang saya tulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2017

Yang Membuat Pernyataan

Tri Handayani

NIM. 1201413058

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Kebahagiaan akan datang ketika kita mampu menikmati proses dan mampu bersyukur kepada sang pencipta"

(Penulis)

PERSEMBAHAN :

1. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang yang telah menaungi penulis.
2. Almamater tercinta dan semua pihak yang telah membantu penulis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rizki, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "**Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung"** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian;
2. Dr. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd, Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudaha dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
4. Drs. Ilyas, M.Ag, Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudaha dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya kepada penulis;
6. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa restu, dukungan dan motivasi dalam segala bentuk;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, April 2017

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tri Handayani

NIM. 1201413058

ABSTRAK

Handayani, Tri. 2017. *"Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung".* Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd. dan Drs. Ilyas, M.Ag.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pengangguran.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE) dalam mengurangi pengangguran di KUB Tani Manunggal; 2) kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pengelola dan anggota KUB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE) di KUB Tani manunggal ini dilakukan secara bertahap mulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 2) kendala yang dihadapi meliputi sifat egois anggota, bahan baku kopi bubuk kemasan susah didapat di luar musim panen kopi, modal usaha kurang, dan pemasaran kopi bubuk. Faktor pendukung KUB meliputi alat lengkap, SDA mendukung, anggota memasarkan produk. Solusi KUB meliputi meningkatkan kekompakan dan kebersamaan kelompok, mencari mitra usaha, menaikkan harga jual.

Saran peneliti sebagai berikut: 1) Membuat peraturan peminjaman dan penggunaan alat milik kelompok dengan jelas disertai dengan sanksi tegas bagi yang melanggar; 2) Membeli kopi biji dalam jumlah yang banyak saat musim panen kopi serta mendatangkan kopi biji dari wilayah lain untuk mendukung persediaan bahan baku; 3) Menjalin mitra usaha dengan pihak lain seperti perusahaan swasta dalam mengatasi kurangnya modal usaha; 4) Menjalin mitra usaha dengan pihak lain seperti bergabung dengan festival-festival kuliner dalam memasarkan kopi bubuk KUB Tani Manunggal.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 10

1.4. Manfaat Penelitian 10

1.5. Penegasan Istilah 12

1.5.1. Program 12

1.5.2. Pemberdayaan Masyarakat 12

1.5.3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 13

1.5.4. Pengangguran 13

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II KAJIAN PUSTAKA .....

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 14

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 14

2.1.2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat 17

2.1.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 19

2.1.4. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 22

2.1.5. Pedekatan Pemberdayaan Masyarakat 25

2.1.6. Strategi Pembedayaan Masyarakat 27

2.1.7. Metode Pemberdayaan Masyarakat 30

2.1.8. Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Masyarakat 36

2.2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 37

2.2.1. Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 37

2.2.2. Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).. 38

2.2.3. Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 39

2.2.4. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan... 40

2.3. Pengangguran 42

2.3.1. Pengertian Pengangguran 42

2.3.2. Jenis Pengangguran 43

2.3.3. Pemecahan Masalah Pengangguran 48

2.4. Penelitian yang Relevan 51

2.5. Kerangka Berpikir 52

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB III METODE PENELITIAN .....

3.1. Pendekatan Penelitian 55

3.2. Lokasi Penelitian 56

3.3. Subjek Penelitian 57

3.4. Fokus Penelitian 58

3.5. Sumber dan Jenis Data 58

3.5.1. Kata-kata dan tindakan 59

3.5.2. Sumber data tertulis 59

3.5.3. Foto 59

3.5.4. Data Statistik 60

3.6. Metode Pengumpulan Data 60

3.6.1. Observasi 60

3.6.2. Wawancara 63

3.6.3. Dkumentasi 65

3.7. Keabsahan Data 66

3.8. Metode Analisis Data 68

3.8.1. Data Reduction (Reduksi Data) 69

3.8.2. Data Display (Penyajian Data) 69

3.8.3. Simpulan / Verifikasi 69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....

4.1. Hasil Penelitian 70

4.1.1. Gambaran Umum Desa Gesing 70

4.1.2. Jumlah penduduk 71

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.1.3. Tingkat Pendidikan 73

4.1.4. Mata Pencaharian 74

4.1.5. Profil KUB Tani Manunggal 77

4.1.6. Identitas Subjek 83

4.1.7. Deskripsi Hasil Penelitian 83

4.1.7.1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama dalam Mengurangi Pengangguran di KUB Tani Manunggal 84

4.1.7.2. Kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama 96

4.2. Pembahasan 110

4.2.1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama dalam Mengurangi Pengangguran di KUB Tani Manunggal 110

4.2.2. Kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama 121

BAB V PENUTUP .....

5.1. Simpulan 129

5.2. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA 132

LAMPIRAN 136

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 54

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KUB Tani Manunggal 82

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Hal

4.1 Jumlah Penduduk Desa Gesing berdasarkan jenis kelamin 71

4.2 Jumlah Penduduk Desa Gesing berdasarkan usia 71

4.3 Jumlah Penduduk Desa Gesing berdasarkan agama 72

4.4 Pendidikan Penduduk Desa Gesing 73

4.5 Jenis mata pencaharian penduduk Desa Gesing 75

4.6 Struktur organisasi KUB Tani Manunggal 80

4.7 Identitas Subjek di KUB Tani Manunggal 83

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

1. Pedoman Observasi 137
2. Pedoman Wawancara 139
3. Pedoman Dokumentasi 141
4. Kisi-kisi Wawancara 143
5. Pedoman Umum Wawacara 148
6. Hasil Wawancara Mendalam 155
7. Catatan Lapangan 194
8. Surat Ijin dan Surat Keterangan Penelitian 202
9. Dokumentasi 204

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (UUD 1945 pasal 25). Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat didunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Indonesia mempunyai banyak potensi yang dapat dimaksimalkan khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, selama ini pemerintah belum memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Apabila pemerintah dapat memaksimalkan dengan baik, maka bidang pertanian dan perkebunan dapat membantu mengurangi pengangguran Indonesia sehingga berdampak kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Wilayah geografis Indonesia yang begitu luas dan berbentuk kepulauan serta jumlah penduduk yang begitu banyak menyisakan berbagai permasalahan bagi pemerintah Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia. Apabila masalah-masalah yang ada tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap permasalahan baru yang lebih kompleks. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Lapangan pekerjaan yang belum mampu menampung seluruh tenaga kerja Indonesia sehingga pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dikarenakan sumber daya manusia Indonesia yang belum memenuhi standar kerja

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam dunia kerja. Tenaga kerja asing (TKA) yang berdatangan ke Indonesia menambah rumitnya masalah pengangguran Indonesia, dengan kualitas sumber daya manusia rata-rata menengah ke bawah para tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang mempunyai banyak keterampilan dan keahlian. Apabila maslah ini tidak segera diatasi bukan tidak mungkin warga negara Indonesia akan menjadi buruh di negaranya sendiri.

Indonesia memiliki tenaga kerja produktif dengan usia dibawah 30 tahun yang sangat banyak. Jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia apabila diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang memadai akan dapat mengurangi pengangguran-pengangguran Indonesia serta dapat mendukung dan memajukan pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS jumlah tenaga kerja Indonesia tahun 2016 sebanyak 127.8 juta jiwa dengan jumlah pekerja sebanyak 120.8 juta jiwa dan menganggur sebanyak 7.0 juta jiwa. Sedangkan pengangguran di Desa Gesing pada tahun 2016 berdasarkan data dari Pemerintah Desa Gesing sebanyak 1383 jiwa.

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak memperoleh pekerjaan yang layak, baik dari segi kemanusiaan maupun dari segi upah sehingga masyarakat tetap merasa dihargai dan dapat bekerja secara optimal. Penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga negara Indonesia dapat menekan jumlah pengangguran Indonesia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup warga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

negara Indonesia yang berdampak terhadap penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 4 menyatakan bahwa "Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya". Pasal tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan kepada tenaga kerja Indonesia dan juga memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada keluarga tenaga kerja.

Pemerintah memfasillitasi tenaga kerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga dapat memenuhi standar yang berlaku dalam dunia kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 11 menyatakan bahwa "setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja". Pelatihan kerja diberikan pemerintah kepada calon tenaga kerja sebagai salah satu upaya untuk membekali calon tenaga kerja dalam menghadapi dunia kerja sehingga calon tenaga kerja mempunyai kompetensi kerja dan siap terjun kedalam dunia kerja. Akhir dari pelatihan kerja ini adalah berkurangnya pengangguran yang ada di Indonesia dan memunculkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

wirausaha-wirausaha baru yang siap bersaing di pasar nasional maupun pasar global.

Masalah pengangguran Indonesia tidak hanya dipengaruhi lapangan pekerjaan yang tidak dapat menampung jumlah tenaga kerja yang begitu banyak, melainkan dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, salah satunya berasal dari sektor pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pendidikan memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai hakikat dan martabatnya untuk menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan sehingga mampu memperbaharui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan jatidirinya. Hal tersebut dapat membantu manusia untuk memilih dan menentukan masa depannya sehingga pengangguran berkurang.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting tetapi tidak disadari oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan. Pemikiran masyarakat Indonesia mengenai pendidikan harus segera diperbaiki sehingga kesadaran masyarakat akan pendidikan semakin tinggi. Ketimpangan pemerataan pendidikan antara wilayah maupun gender perlu mendapatkan penyelesaian dari pemerintah untuk mencegah kecemburuan sosial pada masyarakat. Pendidikan harus mampu menjangkau dan memfasilitasi masyarakat terdepan, tertinggal dan terluar (3T) untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih bermartabat dan berkualitas. Masyarakat yang hidup pada daerah 3T kebanyakan jauh dari kemajuan IPTEK, kekurangan fasilitas penunjang pembelajaran dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

susahnya akses menuju sekolah mengakibatkan masyarakat terdepan, tertinggal dan terluar (3T) lebih memilih tidak menempuh jalur pendidikan.

Pendidikan harus berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja karena persentase pengangguran dikalangan terdidik terus meningkat. Banyak masyarakat Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka ambil, hal ini mengakibatkan ketidakprofesionalan pada pekerja sehingga banyak masyarakat yang kurang dihormati pada dunia kerja. Keterampilan yang dimiliki masyarakat setelah menempuh pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja mengakibatkan kurangnya kesejahteraan yang didapatkan para pekerja. Hal ini terbukti dengan upah tenaga kerja yang masih rendah. Dengan demikian, penyiapan pendidikan yang berorientasi kepada dunia kerja harus segera diperbaiki sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tidak hilang.

Kondisi pendidikan Indonesia yang masih jauh dari tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus segera dibenahi. Pendidikan harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat mau berpartisipasi penuh dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pada dasarnya pendidikan memberikan suatu ilmu pengetahuan baru mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri sebagai upaya mendapatkan suatu penghidupan yang layak dan bermartabat.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan proses peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap semua anggota masyarakat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang dilakukan melalui berbagai cara (Sutarto, 2007: 1). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kertrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003). Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003). Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 2). Pasal tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pendidikan nonformal memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang peserta didik miliki, sehingga peserta didik mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat yang ada dalam diri peserta didik serta seusai dengan tuntutan dunia kerja.

Pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan mengandung arti luas, yakni mencakup peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan kemampuan lainnya ke arah kemandirian hidup. Kindervatter (Kamil, 2009 : 54-55) menjelaskan bahwa: peran pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan di dalamnya meliputi peningkatan dan perubahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sumberdaya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal perlu dirancang melalui berbagai pendekatan antara lain : (a) pendekatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, (b) pendekatan menggunakan dan menggali potensi masyarakat setempat, (c) menciptakan sikap mandiri pada warga belajar, (d) memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Dengan demikian proses pemberdayaan pada masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat.

UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 4 menjelaskan bahwa "satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis". Dengan demikian, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu kelompok belajar yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup atau *lifeskill* masyarakat sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran Indonesia.

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang sangat sesuai dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Indonesia. Pendidikan nonformal bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Proses pembelajaran dalam pendidikan nonformal dilakukan sepanjang hayat tanpa mengenal usia, waktu dan tempat. Selain itu, proses pembelajaran pendidikan nonformal tidak mengacu kepada benar atau salah, melainkan proses

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pembelajaran yang mampu menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, rasa keingintahuan dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan baru (meskipun hasilnya keliru), memberikan keterbukaan terhadap kemungkinan baru, menumbuhkan demokrasi, memberikan kemerdekaan dan memberikan toleransi terhadap kekeliruan akibat kreativitas berfikir (Bakrie (Sutarto, 2007 : 114)).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memberdayakan keluarga miskin dan atau pengangguran guna meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. KUB Tani manunggal berlokasi di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung berada dibawah tanggung jawab Kepala Desa Gesing. Lokasi KUB Tani Manunggal yang berada pada daerah pedesaan dengan kebun kopi yang luas dan produktif, memberikan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani kopi. Tanaman kopi memiliki nilai jual yang tinggi dan juga mempunyai banyak penggemar di masyarakat. Namun, petani kopi harus mencari pekerjaan lain diluar musim panen kopi karena kopi memiliki sifat berbuah pada musim tertentu. Keadaan demikian menjadikan petani kopi sebagai pengangguran musiman.

KUB Tani Manunggal bergerak pada bidang pengolahan hasil perkebunan dan pertanian dengan produk unggulannya olahan kopi bubuk. KUB Tani Manunggal mendapatkan juara 1 pada lomba citarasa kopi tingkat nasional pada tahun 2014. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di KUB Tani Manunggal mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui usaha kopi baik pada musim panen

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kopi maupun diluar musim panen kopi sehingga dapat mengurangi pengangguran di Desa Gesing. KUB Tani Manunggal mampu memaksimalkan potensi-potensi lokal yang ada di Desa Gesing sehingga memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi serta memberikan penghidupan yang lebih layak bagi petani kopi dan juga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan di Desa Gesing.

Berdasarkan hal tersebut, kelompok usaha bersama (KUBE) sangat penting untuk diberdayakan di Indonesia sebagai suatu upaya dalam mengurangi pengangguran. Konsep pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman sehingga masyarakat dapat bertahan ditengah persaingan yang sangat ketat di era global seperti sekarang ini. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam judul "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung" yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1.2.1. Bagaimana penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha (KUBE) dalam mengurangi Pengangguran di KUB Tani Manunggal ?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2.2. Bagaimana kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian di KUB Tani Manunggal, adalah sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengurangi pengangguran di KUB Tani Manunggal.

1.3.2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

1.4.1.2 Memberikan tambahan kajian pengembangan Ilmu Pendidikan Luar Sekolah mengenai Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4.1.3 Sarana informasi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Pengelola :

Memberikan informasi kepada pengelola KUB Tani Manunggal agar selalu memberikan pelayanan optimal dan terus memberdayakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran di Desa Gesing.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat :

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga masyarakat dapat berperanserta dalam program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya mengurangi pengangguran.

1.4.2.3. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga masyarakat mendapatkan jaminan kesejahteraan pekerjaan, sosial dan ekonomi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.5. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan memudahkan pemahaman, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

1.6.1. Program

Program merupakan kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, pelaksana kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan sumber-sumber pendukung lainnya (Sudjana, 2008:4).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan program adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

1.6.2. Pemberdayaan Masyarakat

Subejo dan Narimo (Mardikanto & Soebiato, 2012 : 31) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial".

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pemberdayaan adalah proses memanusiakan manusia agar memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi khusunya dalam bidang ekonomi melalui KUB Tani Manunggal.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6.3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 Tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), menyebutkan : Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah KUB Tani Manunggal.

1.6.4. Pengangguran

Sukirno (Wijayanto, 2010 : 36) Pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengangguran adalah masyarakat Desa Gesing yang dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*empower*" yang artinya "*memberi kuasa / wewenang kepada*". Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. Kata "berdaya" diartikan sebagai kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu atau membuat seseorang layak (Hasan Alwi, dkk, 2001: 241). Sedangkan secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata "power" yang berarti kekuatan.

Parsons, dkk (Mardikanto & soebiato, 2012 : 28) menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang cukup menjadi perhatiannya. Hal ini diperkuat oleh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Journal Busch and Valentine : Empowerment Practice : A Focus on Betteres Women volume 5 *No. 1* oleh Guiterrez, DeLois, et al (Affilia, 2000 : 83) :

> *"basing the helping relationship on collaboration, trust and share power; utilizing small groups; accepting the client's definition of the problem; identifying and building on the client's strengths; raising the client's consciousness of issues of class and power; actively involving the client in the change process; teaching specific skills;...experiencing a sense of personal power within the helping relationship; and mobilizing resources or advocating for clients."*

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mengidentifikasi kekuataan atau potensi individu tersebut serta memberikan kepercayaan dan keterampilan dan juga mengembangkan sumber daya manusia yang ada tanpa mengadili individu yang bersangkutan.

Sumodiningrat (Mardikanto & soebiato, 2012 : 29) menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial.

Mead (Mardikanto & soebiato, 2012 : 68) menyatakan bahwa, proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses "menggurui" melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif. Keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari seberapa jauh terjadi transfer pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku; tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi dan pertukaran pengalaman (sharing).

SDC (Mardikanto & soebiato, 2012 : 73) menyatakan bahwa, Pemberdayaan tidak sekedar proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.

Tim Deliveri (Mardikanto, 2012 : 76) menyatakan bahwa, pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2012 : 100).

Priyono (Arsiyah, 2009 : 371) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lai-lain.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kelsey dan Hearne (Mardikanto & soebiato, 2012 : 101) menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Falsafah pemberdayaan adalah : bekerja bersama masyarakat untuk memantaunya agar

mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them-selves).*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan masyarakat adalah upaya memanusiakan manusia melalui proses belajar partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri sendiri dan pranata-pranatanya dengan memaksimalkan potensi lokal sehingga masyarakat dapat berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki agar terwujud kehidupan yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

2.1.2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews (Mardikanto & soebiato, 2012 : 105) menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Soedijanto (Mardikanto & soebiato, 2012 : 108) menyatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan Indonesia sesuai dengan perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, antara lain :

1) Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari kegiatan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain;
3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar;
4) Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
5) Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
6) Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders;
7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan;
8) Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

10) Desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Dengan demikian, penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatannya/pekerjaannya dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai yang direncanakan.

2.1.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered development). Pemberdayaan selalu merujuk terhadap upaya perbaikan, terutama perbaikan terhadap mutu-hidup manusia, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budayanya. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat sehingga pengangguran berkurang yang berakhir pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang tersedia sebagai dampak dari pembangunan.

World Bank (Mardikanto & soebiato, 2012 : 110) mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menyangkut :

1) Perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi-makro dan pengelolaan fiskal;
2) Perbaikan modal fisik, berupa sarana prasarana, bangunan, dan mesin;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3) Perbaikan modal SDM, berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar-kerja;
4) Pengembangan modal-sosial, yang menyangkut: keterampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan, dan norma hubungan sosial yang lain;
5) Pengelolaan sumberdaya alam, baik yang bersifat komersial maupun non komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk : air-bersih, energi, serat, pengelolaan limbah, stabilitas iklim dan beragam layanan penunjangnya.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2005: 60).

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1) Perbaikan pendidikan (better education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan harus mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup terhadap peserta didik sehingga peserta didik merasa butuh, penting dan merasa memiliki pendidikan;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2) Perbaikan aksesibilitas (better accesibility), dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
3) Perbaikan tindakan (better action), berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
4) Perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;
5) Perbaikan usaha (better business), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
6) Perbaikan pendapatan (better income), perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
7) Perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

8) Perbaikan kehidupan (better living), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
9) Perbaikan masyarakat (better community), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan sistem kelembagaan untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan yang berujung terhadap menurunnya angka pengangguran indonesia yang berdampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat.

2.1.4. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Tim Delivery (Mardikanto & soebiato, 2012 : 125) menyebutkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Seara rinci masing-masing tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

a) Seleksi Lokasi / Wilayah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepekati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

b) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masayarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

c) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal nerikut :

(1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Proses ini meliputi :

(a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya;

(b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan;

(c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan;

(d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan kajian, meliputi :

(a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah;

(b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik;

(c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah;

(d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

(3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan dasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperlihatkan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadiperhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan hika diperlukan;

(4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation*/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan_ maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d) Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah pendampingan untuk menyiapkan masyarakat

agar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pendampingan masyarakat dilakukan oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Peran tim pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

2.1.5. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Axinn (Mardikanto & soebiato, 2012 : 159) mengartikan pendekatan sebagai suatu gaya yang harus menentukan dan diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*). Terkait dengan pemberdayaan, Nagel (Mardikanto & soebiato, 2012 : 159) mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan :

1) Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan;
2) Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan;
3) Pengembangan sumberdaya manusia / fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan;
4) Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan, yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara lain :
   a. Publik ataukah swasta;
   b. Pemerintah ataukan non-pemerintah;
   c. Dari atas (birokrasi) ataukah dari bawah (partisipatif);
   d. Mencari keuntungan ataukah non-profit;
   e. Karitatip ataukah harus mengembalikan biaya;
   f. Umum ataukah sektoral;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

g. Multi-tujuan ataukah tujuan tunggal;

h. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.

Kartasasmita (Mardikanto & soebiato, 2012 : 162), secara sederhana merumuskan pendekatan pemberdayaan masyarakat kedalam tiga strategi pokok, yaitu :

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat;
2) Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat;
3) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat.

Pemberdayaan masyarakat tidak menjadikan masyarakat sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi masyarakat merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

Pertama, upaya harus terarah (targeted). Program ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya;

Kedua, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang akan menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya;

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok lebih efektif apabila dibandingkan dengan pendekatan individu, hal ini dikarenakan penggunaan sumber daya lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

2.1.6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan dan tercapainya tujuan (Mardikanto, 2012 : 168).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu :

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;

Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;

Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Suharto (Mardikanto & soebiato, 2012 : 170) mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususmya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu :

1) Motivasi, setiap rumah tangga didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
3) Manajemen diri, setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4) Mobilisasi sumberdaya, pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
5) Pembangunan dan pengembangan jejaring, pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5P strategi pemberdayaan yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan :

1) Pemungkinan: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;
2) Penguatan: melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3) Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok - kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
4) Penyokongan: atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas - tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agat tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan;
5) Pemeliharaan: dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Terlepas dari semua strategi tersebut, keberhasilan strategi pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kelompok penerima manfaat itu sendiri. Hal ini dikarenakan pilihan strategi tergantung motivasi fasilitator dan perlu memperhatikan kondisi kelompok penerima manfaat, yang olehnya dikemukakan dalam sebuah kontinum.

2.1.7. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Subejo dan Supriyanto (Mardikanto & soebiato, 2012 : 197) menyatakan bahwa, Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

atau suatu kerangka berpikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metodologi ialah suatu sistem berbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, terdapat beragam metode yang diterapkan dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, banyak diterapkan beragam metode pemberdayaan masyarakat "partisipatif" berupa :

1) RRA (Rapid Rural Appraisal)

RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh "orang luar" dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat.

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari :

a) Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas;
b) Observasi/pengamatan lapang secara langsung;
c) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya;
d) Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik;
e) Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi;
f) Kecenderungan-kecenderungan;
g) Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat;
h) Pembuatan laporan lapang secara tepat.

Untuk itu, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a) Efektivitas dan efisiensi, kaitannya dengan biaya, waktu, serta perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan dibanding sekedar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan;
b) Hindari bias, melaluui : instropeksi, mendengarkan, menanyakan secara berulang-ulang, menanyakan kepada kelompok termiskin;
c) Triangulasi sumber informasi dengan melibatkan Tim Multidisiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif;
d) Belajar dari dan bersama masyarakat;
e) Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check dan jangan terpaku pada bakuan yang telah disiapkan.

Bahaya dari pelaksanaan kegiatan RRA adalah, seringkali apa yang dilakukan oleh Tim RRA bahwa mereka telah melakukan praktik "partisipatif", meskipun hanya dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan bertanya langsung kepada para informan yang terdiri dari warga masyarakat setempat.

2) PRA (Participation Rapid Appraisal) atau penilaian desa secara partisipatif

PRA, merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan secara partisipatif. Berbeda dengan RRA yang dilakukan oleh TIM yang terdiri dari orang luar, PRA dilakukan dengan lebih melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholders (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding instruktur atau guru yang menggurui.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Melalui PRA, dilakukan kegiatan-kegiatan:

a) Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penialaian keadaan;
b) Analisis keadaan yang berupa :
   - Keadaan masa lalu, sekarang dan kecenderungannya di masa depan;
   - Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya;
   - Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah;
   - Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau analisis SWOT terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
c) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya);
d) Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program / kegiatan yang akan diusulkan / direkomendasikan.

3) FGD (Focus Group Discussion) atau diskusi kelompok yang terarah

FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang yang tidak saling mengenal) yang oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya. Pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang narasumber.

Sebagai metode pengumpulan data, FGD dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu:

a) Perumusan kejelasan tujuan FGD, utamanya tentang isu-isu pokok yang akan dipercakapkan, sesuai dengan tujuan kegiatannya;
b) Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan;
c) Identifikasi dan pemilihan partisipan, yang terdiri dari para pemangku kepentingan kegiatan terkait, dan atau narasumber yang berkompeten;
d) Persiapan ruangan diskusi;
e) Pelaksanaan diskusi;
f) Analisis data (hasil diskusi);
g) Penelitian laporan, termasuk lampiran tentang transkrip diskusi, rekaman suara, foto, dll.

4) PLA (participatory learning and action) atau proses belajar dan mempraktikkan secara partisipatif

PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui : ceramah, curah pendapat, diskusi, dll), tentang sesuatu topik yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan rill yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Manfaat PLA antara lain :

a) Segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dijawab oleh “orang luar”;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b) Masyarakat setempat akan memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pada pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka yang sangat kompleks;

c) Masyarakat akan melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat dibanding orang luar;

d) Melalui PLA, orang luar dapat memainkan peran penghubung antara masyarakat setempat dengan lemaga lain yang diperlukan.

5) SL atau Sekolah Lapang (Farmers Field School)

Sekolah Lapang / Farmers Field School merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (sharing), tentang alternative dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

6) Pelatihan Partisipatif

Pelatihan partisipatif dirancang sebagai implementasi metode pendidikan orang dewasa (POD), dengan ciri utama :

a) Hubungan instruktur / fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat vertikal tetapi bersifat lateral / horizontal;

b) Lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam arti, keberhasilan pelatihan tidak diukur dari seberapa banyak terjadi alih pengetahuan, tetapi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagi pengalaman (sharing) antara sesama peserta maupun antara fasilitator dengan pesertanya.

Pelatihan selalu mengacu kepada kebutuhan pesertanya. Hal ini dikarenakan penerima manfaat pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam. Dengan demikian dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus menerapkan beragam metode sekaligus yang saling melengkapi. Karena itu, didalam setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, setiap fasilitator harus memahami dan mampu memilih metode pemberdayaan masyarakat yang paling baik sebagai suatu cara yang terpilih untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Soesmono (Mardikanto & soebiato, 2012 : 197)).

2.1.8. Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Coombs (Kamil, 2009 : 14) menyatakan bahwa, Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, diselenggarakan di luar persekolahan, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar.

Peran pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat antara lain : (a) hakekat pendidikan nonformal adalah membelajarkan masyarakat yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal, (b) kegiatan pembelajaran dalam pendidikan nonformal merupakan aktivitas yang disengaja dan diorganisasi secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, (c) sasaran pendidikan nonformal adalah semua warga masyarakat dalam membantu membelajarkan (pemerataan pendidikan), dan (d) bertujuan memberikan bekal pengetahuan sikap dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

keterampilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai modal pembangunan nasional.

Sudjana (Kamil, 2009 : 54) secara tegas menerangkan tugas pendidikan nonformal adalah : (a) memberlajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan sikap, nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi pemungkinan perubahan di masa depan, dan (b) membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidupnya.

Peran pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat tidak saja merubah individu, tetapi juga kelompok, organisasi dan masyarakat. Kindervatter (Kamil, 2009 : 54) menjelaskan bahwa : peran pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan didalamnya meliputi peningkatan dan perubahan sumberdaya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya.

2.2. KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

2.2.1. Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Slamet (Tampubolon, dkk. 2006 : 11) menjelaskan bahwa, kelompok adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola / struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dan dalam kurun waktu yang relatif panjang. Kelompok usaha bersama (KUBE) dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai tujuan untuk belajar berusaha bersama melalui kegiatan tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 Tentang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), menyebutkan :

> "Kelompok usaha bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama."

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok usaha bersama (KUBE) adalah kelompok warga masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah yang sama, yang berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan kesejahteraan sosial.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.2. Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Tujuan keberadaan kelompok usaha bersama di masyarakat adalah terwujudnya penurunan angka pengangguran di masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui usaha kelompok.

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang unik dan berbeda-beda dengan pola pikir masing-masing. Dengan demikian, tujuan antara individu yang satu dengan individu yang lain belum tentu sama. Tujuan tersebut harus memperoleh suatu persamaan sehingga dapat menjadi tolok ukur dari kegiatan yang dilakukan.

Tujuan Kelompok usaha bersama (KUBE) diarahkan kepada upaya pengurangan pengangguran yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, melalui : peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok; peningkatan pendapatan; pengembangan usaha; peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara anggota kelompok usaha bersama dan dengan masyarakat sekitar.

2.2.3. Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama

Program kelompok usaha bersama merupakan program dari kementerian sosial sebagai usaha pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan kelompok. Sasaran program kelompok usaha bersama tidak semua masyarakat miskin Indonesia. Kriteria sasaran (peserta didik) dalam program Kelompok Usaha Bersama yaitu:

a. Warga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran.
b. Warga masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, seperti tidak tamat sekolah dasar dan tidak tamat SLTP, dan warga masyarakat yang belum pernah mengenyam pendidikan sehingga tidak mempunyai keterampilan.
c. Penduduk usia produktif (18-35 tahun)
d. Mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e. Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program kursus kewirausahaan kota

f. Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu

Untuk itu sasaran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan program ini bagi mereka yang tidak mampu agar dalam pelaksanaaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut mendapat hasil yang maksimal bagi kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.2.4. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan

Teknik pertanian adalah suatu cara untuk meningkatkan efisiensi usaha petanian guna meningkatkan produktivitas, mutu, kontinuitas pasokan produk-produk pertanian, kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan (Wikipedia). Teknologi pengolahan hasil pertanian artinya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pengolahan hasil pertanian (Purwanto, 2009 : 17). Pengolahan hasil pertanian dapat berupa pengolahan sederhana seperti pembersihan, pemillihan (grading), pengepakan atau dapat pula berupa pengolahan yang lebih canggih, seperti penggilingan (milling), penepungan (powdering), ekstraksi dan penyulingan (extraction), penggorengan (roasting), pemintalan (spinning), Pengalengan (canning) dan proses pabrikasi lainnya (Purwanto, 2009 : 15).

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Pengolahan hasil pertanian adalah (Purwanto, 2009 : 17) :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1) Sifat produk pertanian yang mudah rusak dan bulky sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi yang mampu mengatasai masalah tersebut;
2) Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri menjadi tidak terjamin; dan
3) Kualitas produk pertanian yang dihasilkan pada umumnya masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik didalam negeri maupun di pasar internasional.

Pengolahan hasil pertanian, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Purwanto, 2009 : 17) :

1) Dapat meningkatkan nilai tambah;
2) Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau dikonsumsi;
3) Meningkatkan daya saing; dan
4) Menambah pendapatan dan keuntungan petani.

Dengan pengolahan hasil pertanian dapat memberikan kesejahteraan lebih bagi para petani, hal ini dikarenakan setelah hasil pertanian mengalami proses pengolahan maka hasil panen akan memiliki daya tahan atau dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama dan juga memberikan nilai jual yang lebih serta menciptakan keunggulan kompetitif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3. PENGANGGURAN

2.3.1. Pengertian Pengangguran

Sukirno (Wijayanto, 2010 : 36) Pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Mankiw (2006 : 154) menyatakan bahwa, pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Hal ini diperkuat oleh *Journal American Political Science Review : Unemployment and the Democratical Electoral Advantage volume* 106 oleh John R. Wright (2012 : 685) :

> "*.... higher unemployment increases the vote shares of Democratic candidates.The effect is greatest when Republicans are the incumbent party, but Democrats benefit from unemployment even when they are in control. The explanation for these findings is that unemployment is a partisan issue for voters, not a valence issue, and that the Democratic Party "owns" unemployment. When unemployment is high or rising, Democratic candidates can successfully convince voters that they are the party best able to solve the problem."*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pendapat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa, pengangguran-pengangguran yang ada banyak dimanfaatkan untuk kepentingan demokrasi. Banyak partai politik mengikutsertakan dan memanfaatkan para pengangguran dan menjanjikan sutau kebijakan penyelesaian masalah mengenai pengangguran serta membuka lapangan pekerjaan baru untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua orang yang belum mendapatkan pekerjaan adalah penganggur. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

2.3.2. Jenis Pengangguran

Sukirno (Alghofari, 2010 : 44) menyebutkan berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok, yaitu :

a) Pengangguran normal atau friksional

Pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

Pengangguran friksional disebabkan oleh pergeseran sektoral, dan karena dibutuhkan waktu bagi para pekerja untuk beralih pekerjaan. Disamping itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan bangkrut, kinerja pekerja merosot, atau keahlian pekerja tidak dibutuhkan lagi. Selama penawaran dan permintaan akan tenaga kerja diantara perusahaan berubah, pengangguran friksional tidak bisa dicegah (Mankiw, 2006 : 158).

b) Pengangguran siklikal

Pengangguran yang disebabkan oleh tindakan pengurangan pekerja oleh perusahaan karena kemerosotan permintaan agregat yang berdampak terhadap perusahan-perusahaan lain yang berhubungan lainnya sehingga pengangguran bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c) Pengangguran struktural

Pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

serius dari negara negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

Dengan kata lain, pengangguran struktural disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerja. Pengangguran struktural muncul ketika upah minimum berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aturan upah minimum adalah satu faktor yang menyebabkan kekakuan harga. Serikat pekerja dan ancaman pembentukannya adalah sebab lainnya. Akhirnya, teori upah efisiensi menyatakan bahwa, untuk berbagai alasan, perusahaan akan mempertahankan upah yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2006 : 160).

d) Pengangguran teknologi

Pengangguran yang disebabkan oleh penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Sukirno (Alghofari, 2010 : 46) menyebutkan berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu :

a) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka diakibatkan pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Dengan kata lain, lowongan pekerjaan yang ada tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja yang ada yang berdampak terhadap banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaaan. Apabila hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, maka tenaga kerja yang ada akan menganggur secara nyata dan separuh waktu, oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan atau kemunduran perkembangan industri.

Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas :

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha;
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan;
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

b) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi diakibatkan oleh kelebihan tenaga kerja yang digunakan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diperlukan. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tangah yang kecil.

c) Pengangguran bermusim

Tenaga kerja hanya melakukan pekerjaan mereka pada musim-musim tertentu, dan tidak mempunyai pekerjaan diluar musim tersebut. Contohnya Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim

d) Setengah pengangguran

Tenaga kerja yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mepunyai arti atas produksi secara keseluruhan. Contohnya pekerja yang mempunyai jam kerja satu hingga dua hari dalam satu minggu, atau satu hingga empat jam dalam sehari. pekerja dengan masa kerja tersebut digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemploymed*). Dan jenis pengangguranya dinamakan *underemployment*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.3. Pemecahan Masalah Pengangguran

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang begitu kompleks dan dapat berdampak terhadap banyak hal disekitarnya. Dampak yang paling serius dari pengguran ini salah satunya kemiskinan, apabila permasalahan pengangguran dan kemiskinan tidak mendapatkan penanganan dengan segera maka akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih mengkhawatirkan dan menakutkan antaralain dibidang kriminalitas salah satunya pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya, dibidang kesehatan yaitu angka kematian tinggi dan gizi buruk, serta masih banyak lagi permasalahan yang akan muncul sebagai dampak dari pengangguran.

Para penentu kebijakan dan pakar ekonomi memandang bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan apabila pertumbuhan ekonomi melaju dengan tinggi dan stabil. Apabila pandangan ini dianggap "benar" sekiranya akan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan kemiskinan dan pengangguran pada khususnya bergerak bagaikan deret kali (Purwanto, 2005 : 94).

Kebijakan pemerintah terkait upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran sudah banyak diupayakan, namun selama ini belum menuai hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan setiap tahunnya. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh banyak faktor penghambat. Hambatan dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran antara lain (Purwanto, 2005 : 94) :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1) Subsidi salah sasaran dan sama sekali tidak menyentuh kebutuhan pokok rakyat, tetapi yang menikmati justru kelompok-kelompok tertentu. Model ini telah berjalan sejak pemerintahan orde baru. Pemerintahan yang masuk kurun reformasi dibuat tidak berdaya jika mereka akan memutuskan kebijakan ekonomi terkait dengan realitas pasar;
2) Proyek dana pengentasan kemiskinan salah target dan sasaran, hal ini disebabkan lemahnya sistem audit;
3) Proyek dana pengentasan kemiskinan yang berupa stimulan distribusinya tidak didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan sistem informasi yang akurat. Parahnya yang memanfaatkan justru kelompok-kelompok siluman yang mengaku pengusaha kecil;
4) Adanya kebocoran dana secara sistematis, kasarnya terjadi korupsi terselubung dan sulit dideteksi;
5) Pendataan dan rekruitmen keluarga miskin tidak dilakukan oleh tenaga profesional (sesuai bidangnya), banyak kasus pendataan dilakukan oleh jajaran pemerintah desa dan praktiknya yang menjalankan tugas adalah para Kepala Dusun dan para Ketua RT setempat.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran belum efektif dan efisien karena belum sepenuhnya menyentuh masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Marius (2004 : 8) dalam mengentaskan pengangguran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1) Tersedianya Lapangan Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi harus dilakukan aktivitas ekonomi yang dapat memicu munculnya investasi baik dalam maupun luar negeri. Perekonomian bangsa yang aman dan stabil dapat menjadi salah satu faktor dalam menarik investor untuk berinvestasi serta dapat menekan angka pengangguran.

2) Dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah kesempatan emas dalam terciptanya peluang untuk bekerja. Adanya permintaan yang tinggi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipengaruhi oleh profesionalisme, keterampilan, sikap dan mental dan sebagainya. Semua elemen itulah yang diharapkan dimiliki oleh TKI sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

3) Adanya Ekspansi Usaha

Ekspansi usaha terjadi ketika ada efisiensi dan efektivitas usaha yang tinggi. Ketika pengusaha melihat peluang yang positif secara ekonomi dari pembukaan usaha-usaha baru, maka para pengusaha melebarkan sayapnya dengan memperluas usaha-usaja ekonomis produktifnya. Perluasan dan pembukaan usaha ini tentu akan membutuhkan diserapnya tenaga kerja baru, maka lahirlah kesempatan untuk bekerja/adanya pekerjaan bagi para penganggur.

4) Adanya Jaminan Tidak Ada Pemutusan Hubungan Kerja

PHK adalah suatu tindakan terakhir dari sebuah perusahaan ketika dihadapkan pada tanda-tanda kemunduran. Pemutusan hubungan kerja adalah suatu tindakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penyelamat bagi perusahaan yang tidak menyenangkan demi tetap bertahan. Hal ini tidak akan terjadi apabila perusahaan maju, produktivitasnya lancar dll. Kondisi tersebut dapat tercipta apabila ekonomi suatu bangsa berada dalam kondisi yang baik dan didukung oleh sistem pemerintahan yang bersih, jujur, tidak bermental KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan sebagainya.

2.4. PENELITIAN YANG RELEVAN

Adapun penelitian yang relevan atau mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung" adalah :

1) Penelitian tentang pemberdayaan ini pernah dilakukan oleh Ristinura Indrika dalam skripsinya yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung dalam meningkatkan Kualitas Hidup (Studi di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung)".

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan kelompok usaha bersama sudah dilaksanakan dengan baik. Anggota berpartisipasi secara aktif dalam seluruh kegiatan sehingga mempunyai keterampilan, pengetahuan, pengalamana dan lapangan pekerjaan baru yang berdampak terhadap meningkatnya kualitas hidup anggota. Kegiatan dari KUBE Tanjung yang diadakan yaitu pelatihan keterampilan pembuatan ceriping ketela mulai dari produksi hingga pemasaran dengan harapan mampu meningkatkan kualitas hidup anggota KUBE Tanjung.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2) Penelitian tentang pemberdayaan ini pernah dilakukan oleh Widiharsono dalam tesisnya yang berjudul "Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Batu Bata Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah)".

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok pada usaha pembuatan batu bata sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan belum dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Hal ini dikarenakan kurangnya modal usaha kelompok dalam mengembangkan usaha produksi batu bata. Disamping itu, kurang kompaknya anggota dalam bidang pemasaran batu bata dengan menjual hasil produksi dibawah harga yang telah disepakati kelompok sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan anggota lainnya.

2.5. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2008 : 60). Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya akan dirumuskan ke dalam paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terdapat beberapa yang harus diamati dalam penelitian "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi

Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung" yaitu masyarakat yang terdiri dari pengelola dan anggota KUB Tani Manunggal yang memiliki masalah mengenai angka pengangguran yang tinggi dan tingkat pendapatan yang rendah. Program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE) memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai cara mengolah kopi sehingga dapat meningkatkan nilai jual kopi, namun dalam menjalankan usahanya banyak kendala yang harus dihadapi oleh KUB Tani Manunggal. Berbagai solusi ditempuh oleh KUB Tani Manunggal untuk dapat mengatasi kendala yang ada sehingga mampu memberikan keterampilan dan usaha bagi anggotanya yang berdampak terhadap berkurangnya pengangguran di Desa Gesing dengan mendapatkan pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di KUB Tani Manunggal, baik pekerjaan sampingan maupun pekerjaan tetap.

KUB Tani Manunggal merupakan salah satu program pendidikan nonformal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah sekitar Desa Gesing sehingga mampu mengurangi pengangguran yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menggambarkan "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengguran Di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung" melalui bagan sebagai berikut :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

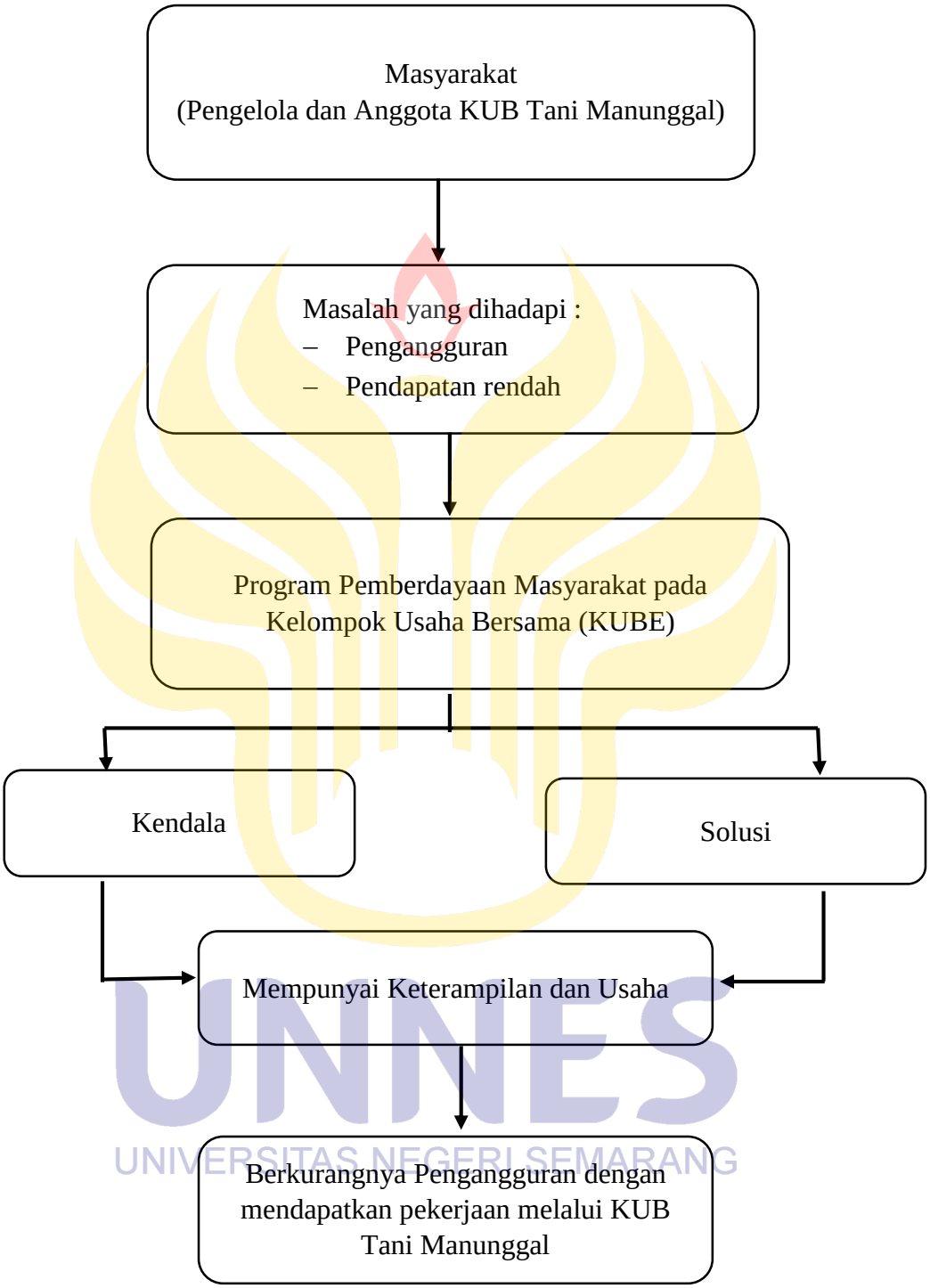

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung"

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan mengenai "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung", maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di KUB Tani Manunggal

Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Tahap persiapan program yang terdiri dari : a) persiapan sumber daya manusia (SDM), b) persiapan alat pengolah kopi bubuk, dan c) persiapan bahan baku;
2. Tahap pelaksanaan program yang terdiri dari : a) proses jual beli kopi biji, b) proses pengolahan kopi bubuk mulai dari kopi biji hingga menjadi kopi bubuk yang siap untuk dikemas, dan c) proses pemasaran kopi bubuk yang dilakukan oleh anggota KUB Tani Manunggal dan masyarakat Desa Gesing;
3. Tahap evaluasi yang dilakukan dalam pertemuan rutin kelompok yang membahas kondisi KUB Tani Manunggal secara keseluruhan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.1.2. Kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama

1. Kendala KUB Tani Manunggal yaitu : a) Sifat egois anggota, b) Modal usaha kurang, c) Bahan baku kopi bubuk kemasan, d) Pemasaran.
2. Faktor Pendukung KUB Tani Manunggal yaitu : a) Alat pengolah kopi bubuk yang lengkap; b) Sumber daya alam (SDA) yang mendukung; dan c) Anggota memasarkan produk kopi bubuk kemasan.
3. Solusi KUB Tani Manunggal yaitu : a) meningkatkan kekompakan dan kebersamaan kelompok; b) mencari mitra usaha; dan c) menaikkan harga jual kemasan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran, sebagai berikut :

5.2.1. Membuat peraturan peminjaman dan penggunaan alat milik kelompok dengan jelas disertai dengan sanksi tegas bagi yang melanggar sehingga alat dapat digunakan untuk keperluan kelompok dengan maksimal;

5.2.2. Membeli kopi biji dalam jumlah yang banyak saat musim panen kopi untuk persediaan produksi diluar musim panen kopi, serta mendatangkan bahan baku kopi bubuk dari wilayah lain untuk mendukung persediaan bahan baku dalam produksi kopi bubuk kemasan;

5.2.3. Menjalin mitra usaha dengan pihak lain seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, perusahaan swasta, bank dan sebagainya sehingga masalah kurangnya modal usaha dapat teratasi;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.2.4. Menjalin mitra usaha dengan pihak lain seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, tempat oleh-oleh khas Temanggung, bergabung dengan festival-festival kuliner dan lain sebagainya dalam memasarkan kopi bubuk sehingga dikenal dan mudah didapatkan oleh masyarakat luas.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Affilia. 2000. *Empowerment Practice : A Fokus on Betteres Women*. **Bush and Valentine, Vol. 5, No. 1, Page. 82-95.** (Online). http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08861090022093840. Diakses pada 4 Februari 2017.

Alghofari, Farid. 2010. *Skripsi : Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007.* Semarang : Universitas Diponegoro.

Alwi, Hasan, dkk. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3.* Jakarta : Balai Pustaka

Arsiyah. 2009. *Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunana Ekonomi Desa (studi kasus pemberdayaan masyarakat industri kecil krupuk ikan di desa kedungrejo, kecamatan jabon, kabupaten sidoarjo).* **Wacana. Hal. 370-375, Vol. 12 No. 2.** (Online).

Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi.* Bogor : Ghalia Indonesia.

BPS. (Online). http://bps.go.id/ . diakases pada 21 Desember 2016.

Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Fakhruddin. 2011. *Evaluasi Program Pendidikan Non Formal.* Semarang : Unnes Press.

Indrika, Ristinura. 2013. *Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup (Studi di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung).* Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan. Edisi Kelima*. Yogyakarta : BPEE-Yogyakarta.

Kamil, Mustofa. 2009. *Pendidikan Nonformal : Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) Di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Komunikan Jepang).* Bandung : Alfabeta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (offline).

Mankiw, N Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta.

Marius, Jelamu Ardi. 2004. *Memecahkan Masalah Pengangguran di Indonesia.* Makalah Pribadi. (Online). Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta : Ar-ruzz Media.

Purwanto. 2005. *Menanggulangi Masalah Kemiskinan Dan Pengangguran di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi.* **Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Hal. 88 – 89, Vol. 2, Nomor. 3.** (Online). http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=6802. Diakses pada 15 Januari 2017.

Purwanto, Helmy. 2009. *Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.* **Mediagro, Hal. 15 – 19, Vol. 5, No. 1.** (Online). http://tep.fateta.unand.ac.id/images/RPKPS/TEKNIK_PENGOLAHAN_HASIL_PERTANIAN.pdf. Diakses pada 15 Januari 2017.

Rifa'i, Achmad. 2007. *Evaluasi Pembelajaran.* Semarang :UNNES PRESS.

SIRUSA BPS. (Online). http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=44. Diakses pada 10 Januari 2017.

Sudjana, Djudju. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Bandung : PT Remaja Rosdakary.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: CV Alfabeta.

Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Nonformal (Konsep Dasar, Proses Pemberlajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat).* Semarang : UNNES PRESS.

Sutarto, Joko. 2008. *Identifikasi Kebutuhan Dan Sumber Belajar Pendidikan NonFormal*. Semarang : UNNES PRESS.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tampubolon,dkk. 2006. *pemberdayaan masy melalui pendekatan kelompok (kasus pemberdayaan masy miskin melalui pendekatan kel usaha bersama (KUBE)).* **Jurnal Penyuluhan. Hal. 10-22, Vol. 2, No. 2.** (Online). http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/2122. Diakses pada 26 Desember 2016.

Tim Penyusun. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 Tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (Online). http://www.balimaknews.net/2010/FTP/peraturan/perdirjend/perdirjen_19_2005.pdf. Diakses pada 20 Desember 2016.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Widiharsono. 2006. *Tesis : Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Batu Bata Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Mantaren II Kecamatan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah).* Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. (Online). http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/10495/2006wid.pdf;jsessionid=AA9A6C9C931BBBD239D46371879BA432?sequence=15. Diakses pada 28 Maret 2017.

Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. *Skripsi : Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten /Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008.* Semarang : Universitas Dipenogoro.

Wikipedia. (Online). https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_pertanian. Diakses pada 15 Januari 2017.

Wikipedia. (Online). https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemasaran. Diakses pada 04 April 2017.

Wikipedia. (Online). https://id.m.wikipedia.or/wiki/sumer_daya_manusia. Diakses pada 04 April 2017.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Wright, John R. 2012. *Unemployment And The Democratic Electoral Advantage*. **American Political Science Review. Vol. 106, No. 4, P. 685-702.** (Online). https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/350FF2535247A605502B6941EAA84E16/S0003055412000330a.pdf/div-class-title-unemployment-and-the-democratic-electoral-advantage-div.pdf. diakses pada 9 Januari 2017.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG